

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang dapat diatasi dengan pembangunan ekonomi adalah pengangguran. Perspektif ekonomi baru memandang bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum bisa dijadikan sebagai pedoman dalam tahap utama pembangunan, namun perhatian harus diberikan pada pengentasan pengangguran, mengatasi ketimpangan pendapatan dan menyediakan lapangan kerja di tengah pertumbuhan ekonomi yang konstan (Todaro, 1997). Ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu negara juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah tingkat pengangguran (Kuncoro, 2005).

Menurut Mankiw (2018), pengangguran termasuk dalam masalah ekonomi yang sangat serius dan bisa dialami oleh siapapun. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, kondisi hidup masyarakat secara keseluruhan akan memburuk. Selain itu, pengangguran juga bisa menimbulkan masalah psikologis seperti stres dan depresi. Bappenas (2010) mendefinisikan pengangguran sebagai keadaan dimana seseorang yang sudah memiliki umur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja tetapi sedang berusaha untuk bekerja, mempersiapkan bisnis baru, dan sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa bekerja.

Dalam pembangunan ekonomi dan bidang pembangunan lainnya, sumber daya manusia selalu menjadi salah satu agen pembangunan, dan dengan itu faktor utama pembangunan adalah jumlah masyarakat atau penduduk yang ada. Persentase penduduk yang berada dibawah standar atau berada di bawah garis kemiskinan juga bisa dipakai untuk mengukur ketimpangan ekonomi antar wilayah. Karena pengangguran juga dapat disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan produktivitas, yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Umumnya, mereka yang tergolong berpendapatan rendah adalah mereka yang bekerja atau menganggur, sementara yang lainnya dikaitkan dengan kemiskinan. Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang tergolong memiliki tingkat perekonomian rendah, maka

berbagai strategi pembangunan harus dilaksanakan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah secara holistik dan berkelanjutan berdasarkan prioritas. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan dengan skala nasional dan daerah menjadi salah satu indikator utama laju penurunan tingkat pengangguran terbuka (Ardian, 2010).

Pemerintah baik itu pusat dan daerah telah menerapkan banyak kebijakan dan program untuk memerangi pengangguran, namun masih terdapat permasalahan kebijakan yang signifikan. tingkat pengangguran di negara-negara maju biasanya berkisar antara 2 hingga 3 persen. Selain merugikan perekonomian negara, pengangguran juga menimbulkan penderitaan sosial yang mendalam. Banyak individu yang kehilangan pekerjaan dituntut untuk lebih berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan harian akibat adanya pendapatan yang kurang.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2013-2023 (%)**

Tahun	Tingkat Pengangguran
2013	6.1
2014	5.9
2015	6.1
2016	5.6
2017	5.5
2018	5,3
2019	5,2
2020	7,0
2021	6,4
2022	5,8
2023	5,3

Berdasarkan tabel 1.1 Selama periode 2013 hingga 2019, terlihat adanya fluktuasi pada tingkat pengangguran di Indonesia, dari 6,1% menjadi 5,2%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi pasar tenaga kerja. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran yang signifikan. Setelah itu, tingkat pengangguran secara

bertahap mulai menurun, tetapi masih jauh dari tingkat sebelum pandemi. Dengan penurunan tingkat pengangguran pasca pandemi COVID-19, menandakan bahwa adanya upaya dari pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran di setiap tahun nya, seperti pelatihan vokasi, penciptaan lapangan kerja baru, serta dukungan bagi UMKM. Selain itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, evaluasi berkala dan penyesuaian terhadap program-program yang ada sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mankiw (2013), pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang berdampak langsung pada kesejahteraan individu. Kehilangan pekerjaan tidak hanya berakibat pada penurunan pendapatan, namun juga dapat memicu berbagai masalah sosial. Hal inilah yang menjadikan isu pengangguran sebagai salah satu isu sentral dalam kebijakan publik. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang tidak bekerja termasuk dalam kategori pengangguran. Misalnya, individu yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga secara penuh tidak dianggap sebagai penganggur karena mereka tidak aktif mencari pekerjaan. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dapat menjadi katalisator dalam penciptaan lapangan kerja baru, sehingga berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebagaimana tercermin dalam peningkatan PDRB, umumnya diiringi oleh perluasan kesempatan kerja. tingkat upah juga memainkan peran penting dalam dinamika pasar tenaga kerja. Upah yang terlalu rendah dapat mendorong partisipasi angkatan kerja, namun upah yang terlalu tinggi dapat menghambat permintaan tenaga kerja dari pengusaha. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, disisi lain, merupakan aset berharga yang dapat meningkatkan daya tarik tenaga kerja di mata pengusaha.

Pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan patokan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Ketika adanya peningkatan aktivitas perekonomian, hal ini akan berdampak dengan adanya kenaikan terhadap produksi barang dan jasa, yang secara ideal akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Akan tetapi,

korelasi antara peningkatan pertumbuhan perekonomian dan tingkat pengangguran tidak selalu bersifat linier. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi, serta kenaikan tingkat perekonomian yang tinggi diikuti oleh tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Menurut Todaro (2000) tingkat kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan dapat diukur melalui tingkat pengangguran. Ketika jumlah orang yang masuk ke dunia kerja terus meningkat, namun kesempatan kerja yang tersedia tidak bertambah secara signifikan, maka akan banyak orang yang menganggur. Pengangguran yang tinggi ini akan berdampak langsung tingkat kemiskinan, karena masyarakat yang masuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja yang rendah dan sehingga tidak semua tenaga kerja yang siap bekerja mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, pengangguran dapat terjadi. Tentunya dengan meningkatnya pengangguran akan mempengaruhi bagaimana produktivitas dan kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Hubungan antara tingkat upah dan tingkat pengangguran merupakan isu yang kompleks dan terus menjadi perhatian dalam kajian ekonomi. Secara umum, kenaikan upah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, peningkatan biaya tenaga kerja akibat kenaikan upah dapat mendorong efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, yang kemudian menyebabkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan berkurang. disisi lain, upah yang terlalu rendah dapat menekan daya produktivitas masyarakat sehingga akan meningkatkan angka pengangguran. Oleh karena itu, penentuan tingkat upah yang optimal memerlukan pertimbangan terhadap berbagai faktor ekonomi, seperti produktivitas, inflasi, dan kondisi pasar tenaga kerja.

Upah masyarakat bisa dikatakan maksimum ketika tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terjadi, akibat hal itu maka terciptanya sumber daya manusia yang baik, dilain sisi apabila banyak nya pengangguran dalam lingkungan masyarakat maka hal ini akan menimbulkan efek yang akan menyebabkan kurangnya pendapatan yang akan diterima oleh masyarakat, tentu saja akan mempengaruhi persentase kesejahteraannya dan akan mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2001). Jika kebijakan

pengupahan pemerintah rendah maka dapat mempengaruhi tingkat pengangguran itu sendiri.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan yang ada di lingkungan masyarakat khususnya di daerah miskin, terdapat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menekan tingkat pengangguran di suatu daerah/kota, diantaranya berfokus pada tingkat kualitas SDM menjadi hal utama ketika tingkat pengangguran muncul. Besar kecilnya sumber daya manusia dapat dilihat melalui indeks pembangunan manusia Mudrajad (2006). IPM sangat berguna dalam membandingkan tingkat kinerja pembangunan manusia antar daerah dan antar wilayah. IPM pada dasarnya adalah indeks yang menggambarkan bagaimana masyarakat suatu daerah mencapai hasil pembangunan baik dari segi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dalam masyarakat yang memiliki faktor indeks pembangunan manusia berupa tingkat kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, peningkatan produktivitas manusia dapat meningkatkan belanja konsumen, oleh karena itu daerah yang memiliki tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung memiliki produktivitas masyarakat yang tinggi juga dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, rendahnya indeks pembangunan manusia mengakibatkan tingkat produktivitas menurun, lebih sedikit produksi yang disebabkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah berarti akan mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu daerah. Dengan demikian, rendahnya ipm berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. (Priastiwi, 2018).

Peningkatan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator umum keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak serta-merta menjamin peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi kesejahteraan yang merata, itu hanya menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan peningkatan PDRB akan sejalan untuk mengurangi kemiskinan. Semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Thamrin dalam Alhudori, 2017). Dengan demikian, tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan agregat ekonomi yang mencerminkan total nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Perubahan PDRB dari waktu ke waktu menjadi tolok ukur yang handal untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, PDRB juga bisa digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Informasi ini sangat berharga dalam merancang program dan kebijakan pembangunan, terutama dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (Pratiwi, 2018). Di Indonesia khususnya kota-kota di berbagai provinsi, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, yang menunjukkan bahwa beberapa kelompok masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara merata. Ini menimbulkan fenomena ketimpangan yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana Upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan PDB dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mengkaji variabel serupa yaitu upah minimum, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, yang dilakukan oleh Frido di tahun 2024, menunjukkan bahwa upah minimum pada dasarnya berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, oleh sebab itu meskipun upah minimum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, satu kebijakan ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan pengangguran jika tidak disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup, sedangkan variabel penelitian seperti pertumbuhan ekonomi dan ipm akan menunjukkan adanya efek negatif terhadap pengangguran. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganis pada tahun 2022, mengindikasikan adanya korelasi positif antara IPM dan upah minimum dengan tingkat pengangguran, sementara pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, temuan ini bertentangan dengan pemahaman umum bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi cenderung menekan angka pengangguran. Perbedaan hasil penelitian ini dapat dijelaskan oleh perbedaan konteks spasial dan temporal dari masing-masing studi, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor spesifik dari setiap wilayah dan periode waktu dalam menganalisis fenomena tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap tingkat pengangguran Terbuka Seluruh Kota di Indonesia”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimana upah minimum berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh kota di Indonesia?
- B. Bagaimana indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh kota di Indonesia?
- C. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh kota di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Utama Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka seluruh kota di Indonesia
- B. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan seluruh kota di Indonesia
- C. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pengangguran terbuka seluruh kota di Indonesia